

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Jakarta
- Friedman, Lawrence M, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan III, Penerbit Nusa Media, Bandung, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Penerjemah M.Khozim
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-16, Djambatan, Jakarta
- Lubis, Mhd Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Mundur, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Bushar, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan ke-12, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur
- Murad, Rusmadi, 2013, *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Edisi Revisi, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta
- Nasution, S., 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta
- Sarjita, 2005, *Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonom Daerah*, Cetakan 1, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta
- Soerodjo, Irwan, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Arkola Offset, Surabaya

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada

_____, 2009, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan VI, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta

Thalib, H. Hambali, 2012, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kedua, Amarta Buku, Yogyakarta

Jurnal/ Artikel/ Tesis-Disertasi

Agustina, Yulia, "Pelaksanaan Kewenangan Damang Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah-Adat Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 Sebagai Dasar Pensertifikatan Tanah Adat Masyarakat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011

Digest Epistema, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial, Volume 6, *Katalog Publikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2016

Handoko, Wuri, "Surat Pernyataan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Anjir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012

HL, H. Wahbah, "Tumpang Tindih Antara Tanah Kuasa Pertambangan Dengan Hak Atas Tanah", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009

Simarmata, Rikardo, "Indonesian Law and Reality in the Delta: a socio-legal inquiry into laws, local bureaucrats and natural resources management in the Mahakam Delta, East Kalimantan", *Disertasi*, Program Studi Doktor (Ph.D) Fakultas Hukum, Universiteit Leiden, Belanda, 2012

_____, Kedudukan Hukum dan Peluang Surat Keterangan Tanah Adat, *Hasil Penelitian*, The Partnership For Governance Reform, 2015

Studies, FAO Land Tenure, “Land Tenure and Rural Development”, *Land Tenure Studies*, FAO’s Land Tenure Service of the Rural Development Division, Italia, 2002

Wicaksono, Lucky Suryo, “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria RI Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas
Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri
Pekerjaan Umum RI, dan Kepala BPN RI Nomor 79 Tahun 2014, Nomor
PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di
Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman
Administrasi Kelurahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penertiban Tanah Terlarang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam
Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi
Pemerintahan Desa

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak
Adat Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat
Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah

Petunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1756/15.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat

Situs website

<http://www.antarakalteng.com/berita/227779/legislatur-jangan-persulit-pembuatan-dokumen-kepemilikan-tanah>, diakses tanggal 10 September 2016

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=240>, diakses pada tanggal 16 September 2016

CSIS (Center for Strategic and International Studies), 2012, *Land Tenure, Property Rights, and Rural Economic Development in Africa*, <https://www.csis.org/analysis/land-tenure-property-rights-and-rural-economic-development-africa> , diakses tanggal 18 Maret 2017

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2016, *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*, hlm. 12, www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.aspx?portalid%3D0%26moduleid%3D1677%26articleid%3D10070%26documentid%3D2911+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id , diakses tanggal 10 April 2017

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan> diakses tanggal 10 April 2017

gerrytri.blogspot.com/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html, diakses tanggal 30 Mei 2017

<http://www.bahasakita.com/musyawarah-mufakat/> , diakses tanggal 30 Mei 2017